

PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DIUPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Imelia Anisa¹

ABSTRAK

Imelia Anisa, Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda; di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam menunjang pendapatan asli daerah kota Samarinda, serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam menunjang pendapatan asli daerah kota Samarinda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang diperoleh dari UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif Model Data Interaktif dari Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sudah mengupayakan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Samarinda berdasarkan fokus penelitian yaitu tata cara memberikan pelayanan, fasilitas dan besarnya tariff, tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi dan target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan. Adapun faktor-faktor pendukung penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu : adanya uji keliling yang membantu menaikkan pendapatan asli daerah yang tugasnya menguji kendaraan-kendaraan yang ada diluar wilayah Kota Samarinda serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini yaitu: masih banyaknya kendaraan yang tidak taat uji, dan masih terdapat biro jasa.

Kata Kunci : *Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Imeliaanisa93@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ketahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan, yang terjadi justru besarnya ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD).

Salah satu pendapatan yang cukup besar diperoleh kota Samarinda untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah dari retribusi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor .

Pada hasil observasi lapangan yang diperoleh di UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda adalah

1. Penerimaan retribusi menurun dari tahun 2013-2015
2. Terdapat biro jasa atau calo
3. Masih banyak kendaraan yang tidak taat uji.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimanakah Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerimaan retribusi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda?

² Peraturan Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan Retribusi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara mengenai Retribusi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan atau para perumus kebijakan dalam upaya pelakasanaannya agara dapat terlaksana dengan baik.

Kerangka Dasar Teori

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi. Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah, sedang dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi- fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kantor pusat. Maddick (dalam kuncoro 2004:3

Kebijakan Publik

kebijakan merupakan suatu tindakan yang sebelumnya disepakati oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Anderson (dalam Winarno, 2012:21).

Pelayanan Publik

pelayanan publik adalah “pemberian pelayanan (malayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Agung Kurniawan, 2005:6).

Sumber Penerimaan Daerah

Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintah daerah maupun tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah, (Siahaan, 2005:12).²

Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. (Siahaan, 2005:5). Retribusi daerah

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. (Kaho, 2005:171).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Ahmad Yani, 2008:51-52).

Definisi Konsepsional

Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda adalah penerimaan atas pembayaran dari balas jasa secara langsung dari masyarakat yang menggunakan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Samarinda yang salah satunya adalah jasa pengujian kendaraan bermotor yang juga memberikan kontribusinya dalam upaya menunjang hingga meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2008:6).

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang meliputi:
 - a. Tata pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Fasilitas dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - c. Tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi Pengujian kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
 - d. Target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Samarinda dalam upaya menunjang PAD oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan pengamatan. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. *Key informan* (informan kunci) yaitu Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Informan yaitu pegawai-pegawai UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor dan Masyarakat (Pengemudi)
2. Sumber data skunder adalah data yang dapat pada lokasi peneliti berupa dokumentasi- dokumentasi , bahan bacaan dan laporan- laporan kegiatan

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan
2. Penelitian lapangan

Analisis Data

Teknik analisis data dalam melakukan penelitian ini penulis juga mengacu pada model interkatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Kondensasi Data (*Data Condesation*) yaitu merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data/mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian, kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisis yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dibuktikan oleh peneliti.
3. Penyajian Data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan Kesimpulan adalah hasil data yang telah diproses dan telah disusun kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksi hubungan dari data yang terjadi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda Terletak di Jl. H.M. Ardan (Ring Road III) Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD Yaitu FRANSISKUS X. LAWING dan dibantu oleh KASUBAG TATA USAHA yaitu MARLIAN RIZAL,SE yang dalam hal ini melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda secara berjenjang dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. Dalam hal ini, UPT Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan untuk melaksanakan sebagian kegiatan dibidang perhubungan dengan menyelenggarakan kegiatan teknis

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pengelolaan pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, serta melaksanakan tugas-tugas umum lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab.

Visi dan Misi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Visi
 - a. Terwujudnya Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor yang memenuhi Persyaratan laik Jalan yang optimal pada setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
 - b. Terwujudnya kesadaran pemilik terhadap Kelaikan Kondisi Teknis kendaraan Bermotor dalam menunjang kenyamanan dan keselamatan di jalan.i.
2. Misi
 - a. Menyusun Rencana Program Tahunan
 - b. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Cermat dan Bertanggung Jawab.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data mengenai bagaimana penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Berikut ini penulis akan membahas data hasil penelitian mengenai Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD.Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda yang penulis peroleh dari penelitian di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara.

a. Tata Cara Memberikan Pelayanan

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari perhubungan.Dari pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan pelayanan dalam kelancaran pengujian kendaraan bermotor itu sendiri.

b. Fasilitas dan Besarnya Tarif

fasilitas yang didapat merupakan fasilitas yang diperoleh dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas yang didapat sudah sesuai. Fasilitas yang didapat berupa pemeriksaan, pengecekan, dan buku keur. Dan tarif retribusi masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikenakan telah retribusi terbagi menjadi beberapa struktur dan ditentukan tarif retribusi yang ditetapkan oleh peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 13 Tahun 2011

c. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi

Dalam Peraturan Walikota tentang Tata cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk mengatur cara pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Peraturan tentang Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan kejelasan tentang cara pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan kepada petugas pemungut retribusi pengujian kendaraan bermotor..

d. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor setiap tahunnya memiliki target dan realisasi untuk penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Target untuk pengujian kendaraan bermotor direalisasikan oleh kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai kantor pengelola retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Faktor pendukung dan penghambat Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk penerimaan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor ada beberapa faktor mempengaruhi yaitu

a. Faktor pendukung Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Yang menjadi pendukung dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor salah satunya adalah adanya uji keliling yang membantu untuk menaikkan pendapatan asli daerah.

b. Faktor penghambat Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Faktor penghambat dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, salah satunya hambatan adalah faktor masih banyaknya kendaraan yang tidak taat uji. Hal ini mempengaruhi terhadap tercapainya target dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah :

- a. Tata cara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan terutama penarikan retribusi pengujian kendaraan bermotor itu sudah sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sudah melaksanakan sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP) dan pengujian kendaraan bermotor sudah berusaha dalam melakukan pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanan.
- b. Fasilitas dan Besarnya tarif dengan adanya fasilitas yang memadai maka proses atau pengelolaan bisa berjalan lancar. Selain itu untuk tarif retribusi

- yang dikenakan kepada para pemilik kendaraan sesuai dengan jumlah berat kendaraan yang mau diuji.
- c. Tata cara Pemungutan dan penyetoran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dan mengenai tata alur prosedur penerimaan retribusi di atas maka dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi di UPT Pengujian kendaraan bermotor memiliki alur Prosedur yang berbelit-belit dan belum sederhana. Dan dalam pemungutan retribusi masih ada yang melakukan pembayaran melalui biro jasa atau calo, agar pemeriksaan kendaraan milik pengemudi bisa cepat tanpa harus mengantri seperti kendaraan- kendaraan lainnya.
 - d. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor mengalami penurunan, dimana terjadinya penurunan pada tahun anggaran 2013-2015 karena masih banyaknya kendaraan yang waktu pendaftaran pertama atau uji pertama di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda dan setelah itu mereka (kendaraan) tidak mendaftarkan ulang di Pengujian Kendaraan Bermotor dan itu yang menyebabkan penerimaan retribusi menurun
 - e. Faktor pendukung dan penghambat Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a. Faktor pendukung dalam Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan adanya uji keliling yang membantu menaikkan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Faktor penghambat dalam Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih banyaknya kendaraan yang tidak taat uji.

Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan saran yang sekiranya bisa menjadi masukan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini antara lain sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penulis menyarankan hendaknya UPT Pengujian kendaraan Bermotor dapat melakukan evaluasi atau monitoring terhadap para pegawai dikarenakan masih terdapat calo. Dan pada alur prosedur yang ada perlu disederhanakan lagi sebaiknya loket yang ada disatukan untuk proses pelayanan tersebut, sehingga proses pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Dalam target dan realisasi hendaknya di adakan online system karena dengan adanya online system akses kendaraan dapat dilakukan dimana saja dan unit pengujian (uji keliling) dapat berjalan maksimal dikarenakan proses pendaftaran, pembayaran retribusi, akses data dan input data hasil uji dapat dilakukan dimana saja.

3. Dalam faktor penghambat sebaiknya di adakan monitoring dan evaluasi terhadap para pengemudi melalui brosur, dan media-media lain agar para pengemudi sadar akan pentingnya menguji kendaraannya tepat waktu dan taat uji.

Daftar Pustaka

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho.2006.Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang, PT Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Halim, Abdul.2004.Akuntansi Keuangan Daerah ,Edisi Revisi.Salemba Empat: Jakarta
- Kaho, Josef R. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.PT.RajaGrafindo Persada: Bandung.
- Kuncoro,Mudrajad, 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah Reformasi,Perencanaan, Strategi, dan Peluang.Penerbit Erlangga: Jakarta
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik Yogyakarta:Pambaharuan
- Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. The Eethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.
- Lubis, M. Solly. 2007. Kebijakan Publik.CV Mandar Maju:Bandung
- Mardiasmo,2009. Perpajakan Edisi Revisi,CV Andi :Yogyakarta
- Mardiasmo,2011.Perpajakan Edisi Revisi ,CVAndi:Yogyakarta
- Moleong,Lexy J.2008. Metologi Penelitian Kualitatif, EdisiRevisi.PT RemajaRosadakarya:Bandung
- Rosidin, Utang, 2010. Otonomi Daerah Desentralisasi. CV Pustaka Setia:Bandung.
- Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Sinar Grafika:Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah , Raja Gravindo Persada:Yogyakarta
- Sinambela dkk, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. PT. Bumi

Aksara; Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

_____ 2008, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Widodo, 2011. Kamus ilmiah Populer Absolut, Yogyakarta.

Widodo, Joko, 2010. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu. Media Publishing: Malang.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo: Yogyakarta

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Kasus. CAPS: Yogyakarta.

Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi. PT. Raja Garfindo: Jakarta

Dokumen-dokumen

Keputusan Menteri Penerapan Aparatur Negara (Kepmenpan Nomor 63/KEP.MEN/PAN/17/2003 bahwa pelayanan publik.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Desentralisasi

Dokumen-dokumen

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda